

Pemanfaatan Informasi Akuntansi pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan

Utilization of Accounting Information at the Sibolga City Health Service to Improve the Quality of Decision Making

Orita Renta, Rini Indahwati & Yulifati Laoli*

Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Indonesia

Diterima: 29 September 2024; Direview: 29 September 2024; Disetujui: 08 November 2024

*Corresponding Email: orita.sipahutar2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan Kota Sibolga, khususnya terkait kualitas informasi akuntansi dan pengaruhnya terhadap perencanaan serta evaluasi kinerja anggaran. Dua variabel utama yang digunakan adalah kualitas informasi akuntansi, yang diukur dengan dimensi relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan kelengkapan, serta pengambilan keputusan yang berfokus pada perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner sebagai langkah awal, dilanjutkan dengan wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang dipilih secara purposif untuk memperdalam analisis. Analisis data juga mencakup uji keandalan dan validitas terhadap instrumen kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi akuntansi di Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Namun, terdapat kendala dalam perencanaan anggaran, terutama pada indikator target pendapatan, serta pada evaluasi kinerja anggaran terkait realisasi pendapatan. Kendala tersebut berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, seperti kurangnya pelatihan dan kualifikasi, serta faktor budaya organisasi yang kurang mendukung pemanfaatan informasi akuntansi secara optimal. Kesimpulannya, meskipun informasi akuntansi telah digunakan, peningkatan kualitas pengambilan keputusan masih memerlukan perbaikan di aspek SDM dan budaya organisasi untuk memastikan informasi akuntansi dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Kata kunci: Evaluasi kinerja anggaran; Informasi akuntansi; Pengambilan keputusan; Perencanaan anggaran

Abstract

This study aims to analyze the utilization of accounting information in decision-making at the Health Department of Sibolga City, particularly examining the quality of accounting information and its impact on budget planning and performance evaluation. The study uses two main variables: the quality of accounting information, measured by relevance, reliability, timeliness, and completeness, and decision-making, focused on budget planning and performance evaluation. This research employs a descriptive qualitative approach through a case study. Data collection began with a questionnaire as an initial step, followed by in-depth interviews with selected informants for deeper analysis. Data analysis also includes reliability and validity testing of the questionnaire instruments. The findings indicate that accounting information at the Health Department of Sibolga City has been used in decision-making processes. However, challenges remain in budget planning, particularly with revenue target indicators and in performance evaluation concerning revenue realization. These challenges stem from limitations in human resources, such as lack of training and qualifications, and organizational culture factors that hinder optimal utilization of accounting information. In conclusion, while accounting information is being utilized, improving the quality of decision-making requires addressing human resource and organizational culture aspects to ensure accounting information is fully optimized.

Keywords: Budget performance evaluation, accounting information, decision making, budget planning.

How to Cite: Renta, O., Indahwati, R., & Laoli, Y., (2024). Pemanfaatan Informasi Akuntansi pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk Meningkatkan Kualitas Pengambilan Keputusan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 7 (2) : 478-485.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Konsekuensi dari transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berpedoman kepada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Indonesia, 2010). Standar Akuntansi Pemerintah berperan untuk membantu para penyusun laporan keuangan pemerintah daerah mencapai laporan keuangan yang berkualitas serta mempermudah pengambilan keputusan internal (Lestari & Sri Rahayu, 2020), sehingga informasi akuntansi yang tersaji dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang salah. Kualitas laporan yang disusun menggambarkan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur (Wijayanti, 2017). Kualitas laporan keuangan sangat mendukung pemanfaatan informasinya oleh pengguna dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi pengguna dan informasi tersebut harus memiliki nilai (Suhartanto, 2018) serta memenuhi karakteristik kualitatif yaitu : (1) relevan, (2) andal, (3) dapat dibandingkan, dan (4) dapat dipahami. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) lampiran I.01 yang berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Paragraf 26 tentang manfaat informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan, disebutkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, sehingga informasi akuntansi tersebut memenuhi karakteristik kualitatif yang disyaratkan, yang dijadikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Komponen laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana diatur pada Lampiran I.01 Kerangka Konseptual menyajikan informasi akuntansi yang berbeda – beda sesuai dengan fungsinya, sehingga pemanfaatan informasi akuntansinya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Salah satu manfaat penggunaan informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan adalah sebagai sumber informasi untuk menyusun rencana anggaran baik pendapatan maupun belanja pada tahun yang akan datang. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan ringkasan data tentang sumber penerimaan dan alokasi belanja pemerintah serta pemanfaatan sumber daya ekonomi pemerintah, juga laporan yang membandingkan anggaran dengan realisasinya, demikian halnya dengan laporan neraca menyediakan data atas pengelolaan aset, kewajiban dan ekuitas. Sehingga Laporan Realisasi Anggaran dan neraca OPD menyajikan informasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun yang akan datang dengan lebih efektif serta dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja.

Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang merupakan bagian dari Pemerintah daerah Kota Sibolga yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang di dukung dengan alokasi anggaran dan barang atau aset yang dibutuhkan. Konsekuensi atas pengalokasian anggaran kepada OPD, menimbulkan tanggungjawab kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB) untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan OPD yang dipimpinnya selaku entitas akuntansi. Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah memenuhi tanggungjawab sisi pelaporan pengelolannya yaitu dengan telah menyusun dan menyerahkan laporan keuangan OPD kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pada komponen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah tersaji informasi akuntansi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan perencanaan anggaran terkhusus untuk pendapatan dan belanja tahun berikutnya, namun dilakukan analisa atas informasi akuntansi pada Laporan Realisasi Anggaran terkait pendapatan



Tahun 2021 s.d Tahun 2023 bahwa Tahun 2021 Pagu Anggaran pendapatan sebesar Rp. 328.279.000 dengan realisasi sebesar Rp. 244.366.700, sedangkan pada Tahun 2022 Pagu anggaran Pendapatan Rp. 508.730.850 dengan realisasi Rp. 246.058.500, pada Tahun 2023 alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 559.603.935. Hasil analisa atas informasi akuntansi ini menggambarkan bahwa pemanfaatan informasi akuntansi terkait pendapatan yang tersaji pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Sibolga belum dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan anggaran, dikarenakan realisasi anggaran tahun sebelumnya tidak menjadi dasar untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya, sehingga menimbulkan kesalahan yang berulang untuk perencanaan anggaran pendapatan dan berdampak pada rencahnya capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam pengelolaan pendapatan.

Penyusunan laporan keuangan sering hanya diperuntukkan sebatas pemenuhan administrasi untuk menggugurkan kewajiban pertanggungjawaban keuangan negara dan tidak dimanfaatkan secara khusus untuk pengambilan keputusan strategis (Wibowo, 2022). Hal ini sesuai dengan pendapat dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan. Pemerintah seharusnya dapat memanfaatkan informasi dalam laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, baik pengambilan keputusan terkait anggaran, investasi, pinjaman, maupun aset tetap (Keuangan, 2022).

Hasil penelitian dari Abul A'la Alrahim (2022) menyatakan hal yang berbeda pada Kabupaten Bantaeng laporan keuangan berbasis akrual telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan melalui pemanfaatan neraca dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. Neraca dimanfaatkan dalam pengadaan sumber daya untuk tahun berikutnya, melakukan klasifikasi dan menilai aset dan kewajiban pemerintah daerah serta membantu memahami potensi realisasi dan posisi keuangan pemerintah daerah, LRA juga telah dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng yaitu untuk menilai tingkat penyerapan anggaran dan bahan evaluasi untuk periode berikutnya seperti sebagai dasar target anggaran tahun berikutnya dan untuk mendanai belanja untuk program-program yang ada, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng (Alrahim & Wibowo, 2022).

Pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pentingnya informasi akuntansi dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, bukan hanya sekedar formalitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan saja. Namun informasi akuntansi dapat dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan sehingga dapat mengurangi kesalahan prediksi atas pagu anggaran yang dibutuhkan, karena informasi akuntansi yang tersaji pada laporan keuangan memuat nilai pagu anggaran dari pendapatan dan belanja tahun yang lalu ataupun tahun berjalan yang telah terealisasi, yang dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan untuk penentuan besaran pagu anggaran pendapatan di tahun yang akan datang lebih efektif dan dapat menghindari terjadinya kelebihan atau pun kekurangan pagu anggaran pendapatan yang signifikan pada masa yang akan datang. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti kembali tentang pemanfaatan informasi akuntansi untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kota Sibolga pada bulan September 202 d.s Juni 2024 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Indonesia, 2010), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh (holistik) dari sebuah fenomena dari sudut pandang subyek. Sedangkan (Adiputra et al., 2021) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Strategi yang digunakan penulis yaitu studi kasus (*case study*). Studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menjelajahi dan memahami suatu



fenomena dengan menganalisis data dari satu atau beberapa kasus yang dipilih (Yin dalam (Nur'aini, 2020).

Obyek dalam penelitian ini terfokus kepada informasi akuntansi Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2022 terkhusus informasi akuntansi yang tertuang pada komponen laporan keuangan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca, dengan variabel penelitian adalah : 1. Kualitaas Informasi Akuntansi yaitu kategori yang dilekatkan pada informasi akuntansi agar informasi dapat memberikan arti dan manfaat bagi penggunaanya (Hanly, 2022). Mc Leod dan (Taufan Maulamin & Sartono, 2021) menjelaskan dimensi dari kualitas informasi yaitu Relevan, Andal, Tepat waktu dan Lengkap. 2. Pengambilan keputusan merupakan proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Eisenfuhr dalam (Patmasari et al., 2024). Dimensi dari pengambilan keputusan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan hasil penelitian dari (Putra et al., 2019) dan (Suhartanto, 2018) yaitu perencanaan anggaran dan evaluasi kinerja anggaran.

Sumber data penelitian ini adalah : 1. Data Primer : Hasil dari responden langsung kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian yaitu Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang dalam hal ini ditujukan kepada Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran. 2. Data Sekunder : data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, literatur, serta sumber lainnya seperti Undang - Undang dan Peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan informasi akuntansi, dokumen atau surat yang diterbitkan oleh OPD yang dapat mendukung penelitian ini. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan langkah awal melakukan pembagian kuesioner kepada 3 orang informan yaitu: Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengguna Anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Informasi Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara mendalam kepada informan yaitu Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pengguna Anggaran menyatakan bahwa laporan keuangan Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang disusun telah menyajikan informasi akuntansi yang berkualitas, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas informasi akuntansi Dinas Kesehatan Kota Sibolga baik dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun neraca telah memenuhi indikator relevan, andal, tepat waktu dan lengkap. Kondisi ini telah sesuai dengan teori kegunaan keputusan (Decision Usefulness Theory), yang menekankan pada kualitas informasi akuntansi, sehingga dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Hal ini telah sesuai dengan hasil penelitian (Putra et al., 2019) yang menjelaskan bahwa informasi laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual memiliki manfaat dalam pengambilan keputusan.

Pemenuhan kualitas informasi akuntansi Dinas Kesehatan Kota Sibolga dengan indikator relevan, andal, tepat waktu dan lengkap terlihat dari pemanfaatan prediksi masa depan (predictive value) dan menegaskan atau mengkoreksi masa lalu (feedback value), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah ditetapkan sebagai produk hukum berupa Peraturan Daerah, penetapan program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta kepatuhan Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam pemenuhan batasan waktu penyusunan laporan keuangan sesuai dengan peraturan (BPK, 2019) dan kepatuhan terhadap peraturan dalam penyusunan laporan Keuangan, dimana Dinas Kesehatan Kota Sibolga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 dan PP No. 71 Tahun 2010.

Pengambilan Keputusan dari Informasi Akuntansi

Perencanaan Anggaran

Hasil penelitian bahwa pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan di Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2022 belum optimal dimanfaatkan. Pemanfaatan Informasi Akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan anggaran untuk penetapan target

pendapatan belum optimal dimanfaatkan, namun untuk pemanfaatan Informasi Akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan pengalokasian anggaran belanja telah optimal dimanfaatkan.

Belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan perencanaan anggaran untuk penetapan target pendapatan dilihat dari dimensi relevan indikator *Predictive value* yaitu dalam penetapan target pendapatan Dinas Kesehatan Kota Sibolga tidak memprediksikan pertumbuhan ekonomi hanya memperhitungkan sumber daya ekonomi Dinas Kesehatan Kota Sibolga. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 telah menekankan bahwa penetapan target pajak daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi Tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah (BPK, 2021a). Demikian halnya pada Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah pada pasal 128 menjelaskan bahwa penganggaran pajak dan retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makroekonomi daerah dan potensi pajak dan retribusi (BPK, 2024). Selanjutnya dikarenakan penerapan penetapan prediksi anggaran pendapatan masih menggunakan sistem prediksi tanpa data serta masih terdapat pemahaman yang keliru terhadap fungsi dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dimensi relevan indikator *Feedback value*, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan ikhtisar pencapaian target keuangan disajikan dalam bentuk persentase target dan realisasi pendapatan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan bagi pengguna yang dapat dimanfaatkan untuk evaluasi kinerja. Menurut (Lamia et al., 2021) bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Pelaksanaan evaluasi terhadap objek pendapatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga belum maksimal, sehingga memberi peluang mendukung budaya kerja yang monoton, serta kurangnya pengawasan dan pengontrolan atas pencapaian target pendapatan, dan tidak terdapatnya pemberlakuan sanksi tegas dari Pengguna Anggaran sehingga terkesan menjadi tindakan pembiaran kepada pengelola pendapatan.

Dimensi andal indikator *Verifiability* ditujukan untuk tingkat efektivitas pendapatan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran bahwa persentase capaian pendapatan Dinas Kesehatan Kota Sibolga Tahun 2022 sebesar 48,37% dinyatakan tidak efektif. Pencapaian interpretasi nilai efektivitas 75% dinyatakan tidak efektif menurut Mahmudi (2016) dalam (Waoma et al., 2023). Rendahnya pencapaian karena kurangnya pengawasan, tidak diberlakukannya pemberian reward dan punishment dan masih berlaku budaya tenggang rasa dalam melakukan penagihan retribusi yang mengarah ke sikap nepotisme. (Fiernaningsih et al., n.d.) yang menyatakan bahwa nepotisme di organisasi dipahami sebagai masalah SDM karena memiliki dampak terhadap fungsi-fungsi manajemen SDM salah satunya evaluasi kinerja, kompensasi.

Dimensi andal dengan indikator netral terbentur dengan budaya tenggang rasa yang mengarah ke sikap nepotisme, sehingga penerapan pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga yang mengatur objek retribusi pelayanan kesehatan dan jenisnya tidak maksimal, sehingga mengakibatkan besaran persentase realisasi pendapatan tahun lalu belum menggambarkan capaian maksimal sehingga berpengaruh dalam penetapan target pendapatan kedepannya.

Dimensi andal dengan indikator penyajian jujur sama halnya terbentur dengan budaya tenggang rasa yang mengarah ke sikap nepotisme, dan terjadinya tindakan penyimpangan yang mempengaruhi pencapaian target pendapatan, sehingga Pasal 56 Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah serta Pasal 18 ayat 2 Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 telah mengatur tentang tarif retribusi pelayanan kesehatan ditentukan bervariasi berdasarkan tempat, jenis, golongan dan lain- lain sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi tidak dapat dicapai secara maksimal, maka persentase realisasi pendapatan tahun lalu belum menggambarkan kondisi maksimal, sehingga penetapan target pendapatan ke tahun berikutnya tidak mengalami pertumbuhan.



Dimensi tepat waktu dengan indikator *timeliness*, untuk hal ini diperlukan adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan pendapatan, pengawasan, pengendalian dan monitoring dan evaluasi pengelolaan pendapatan. Menurut Wahyuningsing (2022) bahwa pentingnya dilakukan kegiatan monitoring untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian saat dilaksanakan monitoring tersebut (Setiawan, 2022). Monitoring juga dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan yang terjadi selama kegiatan yang telah dijalankan, yang diakhiri dengan kegiatan evaluasi guna mengetahui efektifitas pelaksanaan pekerjaan dan juga untuk mengetahui terjadi permasalahan atau tidaknya selama masa kegiatan pencapaian tujuan (target), sehingga dapat diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul tersebut. Keadaan ini dipicu dari ketidakterediaan pembagian capaian target perbulannya sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan dalam melakukan penagihan atau pengutipan retribusi dan tidak terdapatnya sanksi tegas atas ketidaktercapaian target pendapatan. Merujuk pada Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tidak terdapat pasal yang mengatur pemberlakuan sanksi atas ketidaktercapaian target pendapatan, sehingga mengakibatkan dalam penetapan target pendapatan kedepannya tidak memberikan kondisi realisasasi yang sesungguhnya (BPK, 2022).

Dimensi tepat waktu dengan indikator informasi *terupdate* berhubungan dengan perubahan nomenklatur dan kewenangan serta regulasi yang tidak ditindaklanjuti sesegera mungkin sehingga mengakibatkan nomenklatur atas pendapatan yang dirubah masih tetap menjadi beban target pendapatan dari Dinas Kesehatan Kota Sibolga, seperti halnya dengan penerbitan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur pengecualian pembayaran retribusi pelayanan kesehatan seperti halnya untuk biaya pendaftaran, pembebasan pembayaran retribusi bagi penduduk Kota Sibolga yang menikmati pelayanan kesehatan berdasarkan domisili tempat tinggal yang bersangkutan.

Dimensi lengkap dengan indikator informasi yang dibutuhkan tersedia dan lengkap dipengaruhi oleh budaya kerja yang bersifat monoton serta tidak adanya pemberlakuan reward dan panishment. (Riana & Sangatta, 2022) menjelaskan bahwa rendahnya kinerja PNS dipengaruhi oleh budaya kerja dan kemampuan kerja, sehingga tidak memberikan capaian kinerja yang dapat mendukung keberhasilan dari suatu organisasi. Kondisi di atas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 3 bahwa PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap. PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab serta menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap (BPK, 2021b).

Berdasarkan penjelasan di atas pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan perencanaan anggaran untuk penetapan target pendapatan belum optimal dikarenakan sumber daya manusia belum optimal memiliki pemahaman atas perencanaan dan fungsi dokumen perencanaan yang dimiliki oleh OPD, serta masih memiliki pola pikir pada batasan lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sibolga dalam memprediksikan target pendapatan kedepannya, tanpa melihat kondisi lainnya serta budaya kerja yang monoton.

Pemanfaatan Informasi Akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pengalokasian anggaran belanja telah optimal dimanfaatkan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga, didukung oleh Sumber Daya Manusia yaitu Pejabat pengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga memiliki kemampuan dalam pengelolaan anggaran belanja. Selain hal tersebut dalam pengalokasian anggaran belanja pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga ketersediaan data sasaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Petunjuk Teknis yang diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, target kinerja yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kota Sibolga dan hasil evaluasi kinerja dan evaluasi kinerja anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga mendukung perencanaan yang efektif.

Evaluasi Kinerja Anggaran

Pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja anggaran dengan indikator persentase realisasi pendapatan belum optimal dimanfaatkan namun untuk indikator persentase realisasi belanja optimal dimanfaatkan. Dikaji dari hasil wawancara dengan informan bahwa belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi sebagai dasar pengambilan keputusan evaluasi kinerja anggaran dengan indikator persentase realisasi pendapatan pada dasarnya sejalan dengan kondisi belum optimalnya pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk penetapan target pendapatan. Guna peningkatan capaian kinerja anggaran pendapatan maka perlu melakukan pembaharuan database atas objek redistribusi, survey lapangan untuk memastikan kondisi dan keberadaan dari objek redistribusi, melakukan inventarisasi kendala yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target pendapatan, penyusunan strategi sebagai tidakanjnt untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi rendahnya pencapaian target pendapatan, pengusulan pemberian *reward* dan *punishment*, serta perubahan regulasi diperkenankan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Pemanfaatan informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja anggaran dengan indikator persentase realisasi belanja optimal dimanfaatkan karena sumber daya manusia yaitu pejabat pengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kota Sibolga telah memiliki kemampuan dalam pengelolaan anggaran belanja sehingga kinerja anggaran dapat mendukung capaian kinerja yang ditetapkan pada SPM bidang kesehatan, Indikator Kinerja Utama sebagaimana ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Sibolga.

SIMPULAN

Pengambilan keputusan yang berkualitas oleh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Penatausahaan Keuangan di Dinas Kesehatan Kota Sibolga memerlukan pemanfaatan informasi akuntansi yang memenuhi dimensi relevansi, keandalan, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Secara umum, informasi akuntansi telah dimanfaatkan secara optimal dalam keputusan terkait perencanaan anggaran belanja dan evaluasi kinerja anggaran belanja. Penggunaan informasi ini berkontribusi pada peningkatan kualitas keputusan, khususnya dalam alokasi dan pengawasan anggaran. Namun, pemanfaatan informasi akuntansi masih belum optimal dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan target pendapatan dan evaluasi realisasi pendapatan. Kendala ini dapat menyebabkan keputusan yang kurang efektif dan berdampak pada pencapaian kinerja yang optimal. Kriteria optimalisasi mencakup penggunaan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk mencapai target pendapatan dan mengukur realisasi dengan efektif. Untuk meningkatkan pemanfaatan informasi akuntansi, disarankan agar Pemerintah Kota Sibolga, khususnya Dinas Kesehatan, melakukan penataan kembali manajemen kepegawaian. Penerapan prinsip "The right man on the right place" sangat penting, di mana penempatan pegawai disesuaikan dengan frekuensi beban kerja dan kebutuhan spesifik setiap bagian. Selain itu, diperlukan peningkatan komunikasi yang efektif antara manajemen puncak dan staf, yang dapat membantu mengikis budaya kerja yang monoton dan meningkatkan kolaborasi. Strategi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dan meningkatkan komitmen serta kualitas kinerja OPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. S., Trisnadewi, N. W., Oktaviani, N. P. W., Munthe, S. A., Hulu, V. T., Budiastutik, I., & Suryana, S. (2021). *Metodologi Penelitian Kesehatan. yayaan kita menulis*. Bali.
- Alrahim, A. A., & Wibowo, P. (2022). Analisis manfaat laporan keuangan berbasis AKRUAL dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Kabupaten Bantaeng. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 7(3), 80–93. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i3.18579>
- BPK. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika*.
- BPK. (2021a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022*.
- BPK. (2021b). *Peraturan Pemerintah RI No.94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*.
- BPK. (2024). *Perda Kota Sibolga No. 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Fiernaningsih, N., Pudji, H., Ellyn Eka, W., & Rachma Bhakti, U. (n.d.). *Manajemen Sumber Daya Manusia*.



- HANLY, W. (2022). *Analisis Kualitas Laporan Keuangan Ditinjau Dari Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dukungan Manajemen Puncak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan*. Politeknik Negeri Medan.
- Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. *Jakarta (ID): Sekretariat Negara*.
- Kuangan, D. A. D. P. (2022). Pemanfaatan Informasi Laporan Keuangan Untuk Pengambilan Keputusan Pada Kementerian Negara/Lembaga. *Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Direktorat APK*.
- Lamia, S., Karamoy, H., & Morasa, J. (2021). Analisis Penggunaan Informasi Akuntansi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kinerja di Tingkat Satuan Kerja Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 12(2), 153-166.
- Lestari, D., & Sri Rahayu. (2020). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL Dalam Pengambilan Keputusan Internal Dan Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 75-86.
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan metode studi kasus YIN dalam penelitian arsitektur dan perilaku. *INERSIA Lnformasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92-104.
- Patmasari, E., Marzuki, S., & Sumarno, S. (2024). Pengaruh Koordinasi Terhadap Pengambilan Keputusan Pada Kantor Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 3(1), 104-121.
- Putra, S., Sutrisna, D., & Mulyani, S. (2019). Manfaat Informasi Laporan Keuangan Berbasis AkruaL dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Sikap*, 4(1), 492608.
- Riana, A., & Sangatta, S. T. I. E. N. (2022). Pengaruh Budaya Kerja, Kemampuan Dan Komitmen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kinerja Organisasi Di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Akuntansi Manajemen Madani*, 8(1).
- Setiawan, A. (2022). *Model Project-Based Learning (Pengendalian Terbuka (Open Loop) Secara Digit*. Mikro Media Teknologi.
- Suhartanto, A. M. (2018). *Efektivitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah*. Pusdiklatwas BPKP.
- Taufan Maulamin, S. E., & Sartono, S. E. (2021). *Teori Akuntansi*. HWC Publisher.
- Waoma, S., Winanto, A., Bonara, R. S. F., Seran, A. M. I., & ... (2023). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Wibowo, A. M. (2022). *Proses Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Kantor Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Di Sidoarjo*.
- Wijayanti, R. (2017). Pengaruh Kompetensi SDM Dan Sistem Akuntansi Keuangan Derah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3). <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i1.11153>